



**DOKUMEN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2017**



**DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2017**

Jln. dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 57 Lamongan 62211

Telp. (0322) 321338, Fax. (0322) 321338

E-Mail: dinkes@lamongan.go.id, Website : WWW.lamongankab.go.id

Subbag Program dan Evaluasi

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Lamongan Tahun 2017 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan LKjIP ini merupakan salah satu sarana untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2017, sebagai konsekuensi dan konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Disamping itu, penyusunan LKjIP ini juga sebagai bentuk kepatuhan Pemerintah Kabupaten Lamongan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Substansi pokok LKjIP Kabupaten Lamongan Tahun 2017 ini memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan selama tahun 2017, sekaligus menginformasikan berbagai permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat mendukung terwujudnya visi misi, tujuan, dan sasaran Kabupaten Lamongan.

Namun demikian, dalam penyusunan LKjIP ini masih banyak terdapat kekurangan baik menyangkut format dan substansinya, sehingga kritik dan saran sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaan penyusunan LKjIP dimasa mendatang. Semoga dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh seluruh jajaran OPD dan aparatur pemerintah Kabupaten Lamongan mampu menunjukkan kinerjanya secara lebih nyata sesuai dengan tupoksi serta kewenangan masing-masing.

Akhir kata, disampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKjIP ini dan semoga dapat menjadi cermin bagi kita semua untuk melakukan evaluasi kinerja organisasi secara menyeluruh

selama satu tahun kedepan agar tercipta kinerja yang lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya oleh masing-masing OPD Pemerintah Kabupaten Lamongan secara lebih sinergis.

Lamongan, Januari 2018

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LAMONGAN**



DA MUNG AN Hidayat

Pembina Tk. I

NIP.19630702 198903 1 012

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Ikhtisar Eksekutif	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Gambaran Umum Oirganisasi	2
D. Sistematika	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	9
A. Rencana Strategis	9
A.1 Visi dan Misi	9
A.2 Tujuan, sasaran dan Indikator Sasaran	10
A.3 Program dan Kegiatan	11
B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017.....	16
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2017	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017	18
A.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017	18
A.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya	19
A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standart Nasional	19
B. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kenerja Tahun 2017.....	20
C. Akuntabilitas Keuangan Tahun Anggaran 2017.....	21
BAB IV PENUTUP	
Lampiran	
1. Matrik Renstra OPD Tahun 2016 – 2021	
2. Penyempurnaan Rensta OPD	
3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD	
4. Pengukuran Kinerja OPD	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggung jawab teknis pembangunan kesehatan di Kabupaten Lamongan, menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, yang dalam hal ini sudah mengalami perubahan baik pada misi, tujuan, sasaran maupun Indikator Kinerjanya. Untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai, Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan menjabarkan tujuan tersebut kedalam 1 (satu) sasaran, dimana untuk mewujudkan sasaran tersebut telah ditetapkan program operasional dan kegiatan pokok.

Untuk mengukur pencapaian sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan telah ditetapkan indikator pencapaian keberhasilan sasaran sejumlah 1 (satu) indikator.

Diantara indikator yang ada pada tahun 2017 di rumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun 1 (satu) indikator kinerja utama tersebut adalah **“Angka Harapan Hidup”**

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan tahun 2017 merupakan laporan capaian kinerja (performans result) selama tahun 2017 yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2017, selama periode tahun tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan melaksanakan 14 Program ditambah Program Pelayanan Administrasi perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Dari 18 program dijabarkan dalam 116 kegiatan untuk mencapai

1 (satu) sasaran strategis dengan sejumlah indikator sasaran sebagaimana telah di sebutkan.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Rencana Kinerja Tahunan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Penyediaan Sumber Daya Air dan Listrik,
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor,
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas,
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor,
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan,
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan,
9. Penyediaan Makanan dan Minuman,
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah,
11. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan
12. Pembiayaan Perijinan, Sertifikasi dan Kalibrasi Alat-alat Kes.,
13. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan (Prov.)

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pembangunan Gedung Kantor,
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas,
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor,
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan,
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional,
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UPT GFK Gudang Farmasi Kesehatan,

- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal,
 2. Seleksi Tenaga Kesehatan Teladan,
 3. Peningkatan Pengetahuan Petugas Asset Puskesmas,

- 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD,
 2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran,
 3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun,
 4. Forum SKPD,
 5. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi,
 6. Penyusunan Dokumen SPM,

- 5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan**
 1. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan,
 2. Peningkatan, Pemerataan Obat Dan Perbekalan Kesehatan,
 3. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas,

- 6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat**
 1. Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS,
 2. Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien di Puskesmas,
 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan,
 4. Pelatihan Petugas Kesehatan Jiwa terhadap Penanganan Kegawatdaruratan Psikiatrie (Bebas Pasung),
 5. Pelayanan Rawat Jalan Gratis di Puskesmas
 6. Peningkatan Mutu Perizanan Sarana Kesehatan Swasta dan Praktek Perorangan.
 7. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (JKN)

8. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut.
9. Pelayanan Rawat Inap Gratis Ruang Kelas III di Puskesmas.
10. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas
11. Pembinaan Paguyuban Tuberkulosis Paru
12. Pemeriksaan Kebugaran Jasmani Bagi Calon Jamaah Haji,
13. Kunjungan Puskesmas Keliling di Desa Terpencil /Desa Perbatasan,
14. Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan dan Pencegahan AIDS,
15. Pengembangan Taman Posyandu,
16. Biaya Operasional Kesehatan Di Puskesmas,
17. Biaya Operasional Kesehatan Di Kabupaten,
18. Biaya Jaminan Persalinan,
19. Penatalaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN),
20. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Dana Pajak Rokok),
21. Pelatihan Petugas Kesehatan Jiwa terhadap Penanganan Kegawatdaruratan Psikiatrie (Dana Pajak Rokok),
22. Pembinaan Hatra yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Nasional (Dana Pajak Rokok),
23. Asuhan Mandiri di Puskesmas dan Masyarakat (Dana Pajak Rokok),
24. Standar Perijinan, Sarana, Mutu Pelayanan Kesehatan/ Rumah Sakit (Dana Pajak Rokok),
25. Peningkatan Kesehatan Bagi Masyarakat Terdampak/ Pengungsi Korban Bencana (Dana Pajak Rokok)

7. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengembangan Desa Siaga Aktif,
2. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Posyandu,
3. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Kesehatan Sekolah,

4. Pengembangan Media Promosi Kesehatan,
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Pos Pelayanan Terpadu,
6. Peningkatan Kapasitas Kader Saka Bhakti Husada,
7. Survey Rumah Tangga Ber-PHBS,
8. Peningkatan Kapasitas Petugas Puskesmas,
9. Peningkatan Kinerja Poskestren,
10. Sosialisasi Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas untuk Remaja Pedesaan,
11. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Pos Pelayanan Terpadu (Dana Pajak Rokok),

8. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin,
2. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, GAKY, Kurang Vit. A dan kekurangan zat Gizi Mikro Lainnya,
3. Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi),
4. Sosialisasi, Pembinaan dan Penyuluhan Bidang Kesehatan/ Kelas Gizi,

9. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1. Pembinaan dan Pengawasan Air Bersih dan Depo Air Minum,
2. Pengolahan Limbah Medis Padat,
3. Fasilitasi Penyelenggaraan Open Defecation Free (ODF),
4. Pengembangan Program Kabupaten Sehat,
5. Pembangunan Pengolahan Limbah,
6. Fasilitasi Penyelenggaraan Open Defecation Free (ODF) (Dana Pajak Rokok),

10. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular

1. Penyemprotan Fogging/Sarang Nyamuk,.
2. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular,
3. Peningkatan Cakupan Imunisasi,.
4. Pengadaan Sarana Penyimpan Vaksin,.
5. Pekan Imunisasi Nasional/Campak, .
6. Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah
7. Penanggulangan Penderita AFP, Kasus Campak, KLB Flu Burung,
8. Penanggulangan Penyakit Tidak Menular,.
9. Pengamatan dan Pencegahan Program Imunisasi dan Penanggulangan Kasus Difteri,.
10. Pemeriksaan Papsmear, IVA dan Kanker Payudara,

11. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1. Pembuatan Profil Kesehatan,
2. Peningkatan Petugas tentang Simpustronik,
3. Aplikasi Data SIK secara Elektronik,
4. Penilaian Kinerja Puskesmas,
5. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK Non Fisik),
6. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Puskesmas Menuju BLUD,
7. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas,

12. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

1. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya,

13. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

1. Pengadaan Puskesmas Keliling,
2. Pembangunan Poskesdes,.
3. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu
4. Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (Dbh Ct),
5. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas (DAK),
6. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu dan Anak,
7. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas,
8. Pengembangan Sarana Prasarana Puskesmas,
9. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Dokter,
10. Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (BK),

14. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

1. Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita

15. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

1. Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga,
2. Peningkatan Kualitas Laboratorium Pemeriksaan Makanan dan Minuman,

16. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

1. Pembinaan Puskesmas PONEK oleh Tim PONEK Kabupaten
2. Telaah Manajemen Program Kesehatan Reproduksi,
3. Telaahan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA),.
4. Peningkatan Kesehatan Usia Lanjut (Usila)
5. Audit Maternal Perinatal (AMP) .
6. Puskesmas Peduli Lansia.

17. Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas

1. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas,

18. Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Akper

1. Penyelenggaraan Operasional Akper,

Secara umum kendala dan hambatan yang dihadapi pada tahun 2017 adalah faktor dukungan anggaran serta tepatnya perencanaan sesuai dengan waktu dan kebutuhan untuk masing-masing program dan kegiatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor: 03 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan. Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan diatur dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor: 58 tahun 2016 adalah melaksanakan kewenangan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kesehatan.

Sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana setiap penyelenggara pemerintahan wajib melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Penilaian atas keberhasilan/kegagalan lebih difokuskan pada pencapaian sasaran, hal ini berkaitan dengan kinerja yang sebenarnya, dimana sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai/diwujudkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Selaras dengan Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan yaitu "Terwujudnya Masyarakat Lamongan yang Mandiri Untuk Hidup Sehat" dimana pembangunan kesehatan harus dengan seksama memperhatikan dasar-dasar pembangunan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang berpedoman pada tugas pokok dan fungsi dengan mengacu pada Standart Pelayanan Minimal (SPM).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

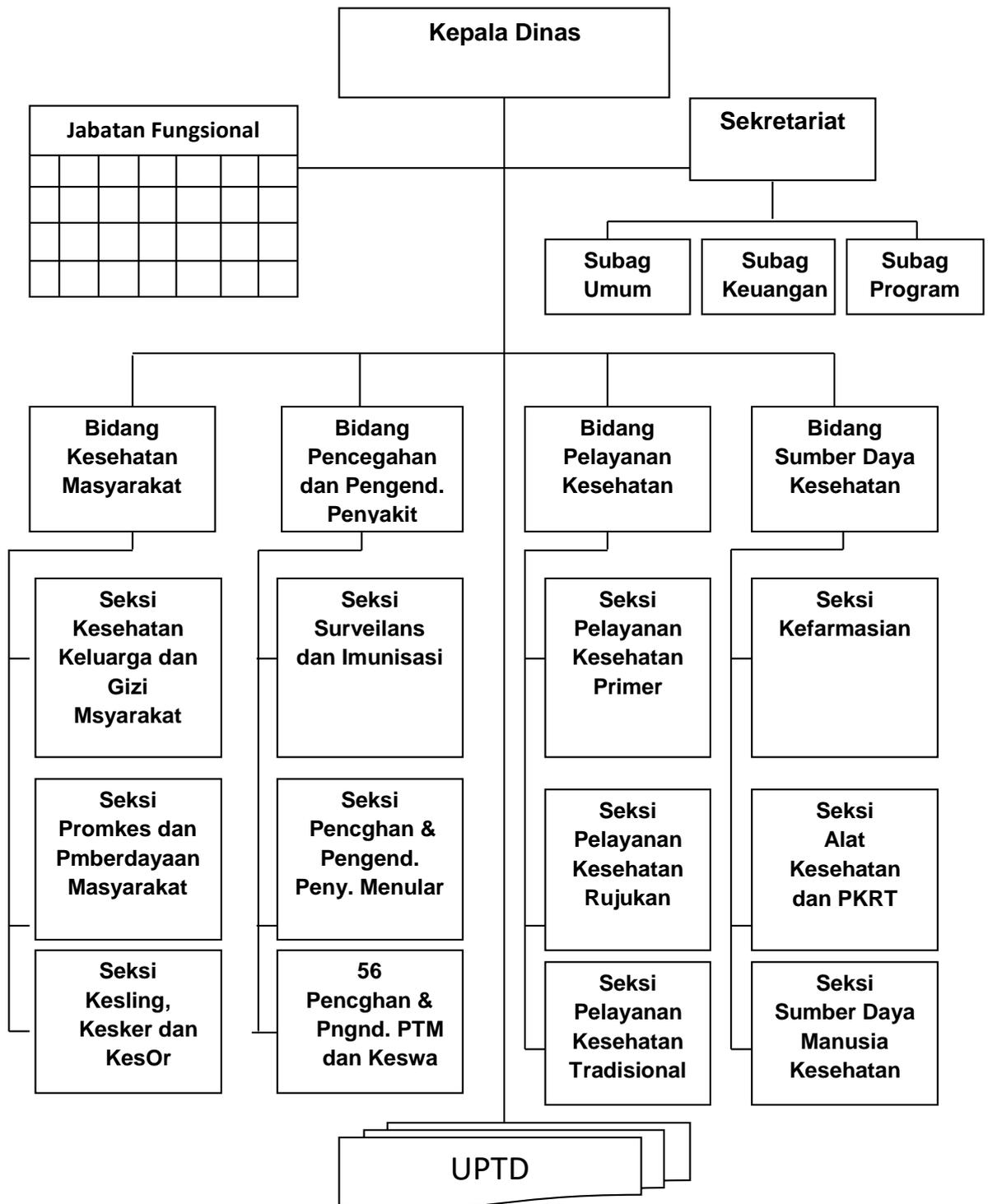
Adapun penjelasan maksud dan tujuan penyusunan LKjIP adalah sebagai berikut:

1. Maksud Penyusunan LKjIP
 - a. Sebagai acuan untuk menyusun perencanaan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan tahun berikutnya.
 - b. Sebagai barometer/tolok ukur keberhasilan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.
2. Tujuan Penyusunan LKjIP
 - a. Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tupoksi dan kewenangan pengelolaan sumber daya.
 - b. Untuk memberikan gambaran kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang membawahi :

1. Sekretariat, yang terdiri atas : Sub Bagian Program dan Evaluasi; Sub Bagian Umum; serta Sub Bagian Keuangan
2. Bidang Pelayanan Kesehatan, yang terdiri atas : Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional,
3. Bidang P2P, yang terdiri atas Seksi Surveilans dan Imunisasi, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Seksi Pencegahan dan Pengendalian PTM dan Kesehatan Jiwa,
4. Bidang Sumberdaya Kesehatan yang terdiri atas Seksi Kefarmasian, Seksi Alkes dan PKRT, Seksi SDM Kesehatan,
5. Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat yang terdiri atas Seksi Kesga dan Gizi Masyarakat, Seksi Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Kesling, Kesker dan Kesorga.



Penyusunan LKJIP Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Tahun 2017 didasarkan pada tugas pokok dan fungsinya yang terdiri dari program-program kesehatan seperti tercantum dalam Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) tahun 2017 yang meliputi 18 program, 116 kegiatan yang dilaksanakan oleh sekretariat dan 4 Bidang, yaitu :

1. Sekretariat = 28 kegiatan
2. Bidang Pelayanan Kesehatan = 32 kegiatan
3. Bidang P2P = 10 kegiatan
4. Bidang Sumber Daya Kesehatan = 13 kegiatan
5. Bidang Kesehatan Masyarakat = 32 kegiatan
6. Akper = 1 kegiatan

Kebutuhan akan sumber daya manusia bidang kesehatan sebagai pemeran utama berhasilnya program-program layanan kesehatan memberikan peran yang sangat besar dalam proses pembangunan kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan telah menyediakan SDM yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Hal itu tidak terlepas dengan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada. Sumber daya manusia dimaksud tersebar di puskesmas maupun Dinas kesehatan yang diklasifikasikan sesuai dengan profesi, status dan kepangkatan :

1. Personil

Untuk mendukung keberhasilan seluruh program bidang kesehatan dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang kesehatan. Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya kesehatan tersebut, maka di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan telah disediakan tenaga kesehatan yang di klasifikasikan sebagai berikut :

a. PNS

1	Dokter umum sebanyak	:	48 orang
2	Dokter gigi sebanyak	:	47 orang
3	Kebidanan sebanyak	:	457 orang
4	Keperawatan sebanyak	:	212 orang
5	Kesehatan Masyarakat sebanyak	:	16 orang
6	Sanitasi sebanyak	:	7 orang
7	Apoteker sebanyak	:	4 orang
8	Farmasi sebanyak	:	3 orang
9	Laborat sebanyak	:	21 orang
10	Gizi sebanyak	:	15 orang
11	Administrasi sebanyak	:	227 orang
12	Perawat Gigi sebanyak	:	14 orang
13	Pejabat Struktural sebanyak	:	21 orang

b. Kontrak dan Sukwan

1	Dokter umum sebanyak	:	4 orang
2	Dokter gigi sebanyak	:	- orang
3	Kebidanan PTT sebanyak	:	120 orang
4	Keperawatan PTT sebanyak	:	148 orang
5	Administrasi sebanyak	:	- orang
6	Gizi sebanyak	:	- orang
7	Lain-lain sebanyak	:	646 orang

Bila tenaga tersebut klasifikasi berdasar pada kepangkatan sebagai berikut :

1	Pembina Utama sebanyak	:	- orang
2	Pembina Utama Madya sebanyak	:	- orang
3	Pembina Utama Muda sebanyak	:	6 orang
4	Pembina Tk. I	:	12 orang
5	Pembina sebanyak	:	56 orang
6	Penata Tk. I sebanyak	:	215 orang

7	Penata sebanyak	:	165 orang
8	Penata Muda Tk. I sebanyak	:	197 orang
9	Penata Muda sebanyak	:	123 orang
10	Pengatur Tk. I sebanyak	:	136 orang
11	Pengatur sebanyak	:	201 orang
12	Pengatur Muda Tk. I sebanyak	:	4 orang
13	Pengatur Muda	:	13 orang
14	Juru Tk. I	:	- orang
15	Juru	:	1 orang
16	Juru Muda Tk. I	:	- orang
17	Juru Muda	:	- orang

2. Sarana dan Prasarana

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, baik itu pelayanan kesehatan di tingkat Kabupaten maupun Puskesmas dan jaringannya pemerintah Kabupaten Lamongan khususnya Dinas Kesehatan selalu berusaha untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung program-program yang telah direncanakan. Adapun jumlah sarana kesehatan yang ada sebagai berikut :

a. Sarana pelayanan kesehatan pemerintah :

1.	Puskesmas	:	33 buah (32 Puskesmas perawatan, 1 puskesmas tanpa perawatan)
2.	Poskesdes	:	474 buah
3.	Pustu	:	109 buah
4.	Polindes	:	217 buah
5.	Ponkesdes	:	161 buah
6.	Rumah Sakit daerah	:	2 buah
7.	Gudang Farmasi Kesehatan	:	1 buah
8.	Laboratorium Kesehatan	:	1 buah

b. Sarana pelayanan kesehatan swasta :

1.	Klinik	:	65 buah
----	--------	---	---------

2. Apotik sebanyak : 87 buah
3. Rumah Sakit Swasta sebanyak : 7 buah
4. Rumah Sakit Ibu dan Anak : 1 buah
5. Rumah Sakit Bedah : 1 buah

3. Pembiayaan

Untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan di Tahun Anggaran 2017 memperoleh total anggaran kinerja sebesar Rp. 172.072.827.269,-. Pelaksanaan anggaran pembangunan dipergunakan untuk mewujudkan 18 (delapan belas) program dengan 116 (seratus enam belas) kegiatan yang secara rinci akan disampaikan pada Bab. III.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan pengidentifikasian sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

Bab I - Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas, profil Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP 2017.

Bab II - Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan muatan, Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Tahun 2017 dan Penetapan Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan kabupaten Lamongan tahun 2017.

Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pencapaian kinerja dikaitkan dengan pertanggung jawaban kinerja terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2017

Bab IV - Penutup, menjelaskan kesimpulan secara tertulis dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Tahun 2017 dan menguraikan rekomendasi bagi perbaikan dimasa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Beranjak dari Visi dan Misi Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2011, serta untuk mempersiapkan keberhasilan program dan kegiatan di tahun mendatang, maka Dinas Kesehatan Kabupaten yang merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai institusi yang mempunyai fungsi pelayanan, menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut:

1. Visi dan Misi

- a. Visi Pemerintah Kabupaten Lamongan

Visi adalah impian menantang yang diharapkan untuk masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi, merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021. Kabupaten Lamongan mencetuskan visi dengan terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder's dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif, sehingga ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, yaitu: ***“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”***.

b. Misi Pemerintah Kabupaten Lamongan

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan adalah Misi ke-1 (satu) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 yaitu ***“Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan”***.

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

a. Tujuan

Dalam rangka mendukung pencapaian misi ke-1 maka ditetapkan tujuan Dinas Kesehatan adalah ***“Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”*** dengan indikator tujuan ***“Indeks Kesehatan”***.

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TAHUN DASAR 2016	TARGET
				TAHUN AKHIR RENSTRA
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	$((e_0 - 25)/(85 - 25)) \times 100$ Dimana : e ₀ ; Angka Harapan Hidup; 25 Angka Min. Harapan Hidup (UNDP); 85 Angka Max. Harapan Hidup (UNDP)	0.796	0.801 - 0.804

b. Sasaran dan Indikator Sasaran

Dalam rangka mencapai tujuan maka ditetapkan sasaran Dinas Kesehatan adalah ***“Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat”*** dengan indikator sasaran ***“Angka Harapan Hidup”***.

SASARAN STRATEGIS	INDIKTOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TAHUN DASAR 2016	TARGET TAHUNAN				
				2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Angka Perkiraan Lama Hidup: Rata-rata Penduduk dengan Asumsi tidak ada Perubahan pola mortalitas menurut Umur	71.77	71.79	71.83	71.86	71.90	71.94

c. Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

Instansi : Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan

Tugas : Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Umum di Bidang Kesehatan

Fungsi : Perumusan Kebijakan Teknis dan Strategis di Bidang Kesehatan

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN /PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Angka Perkiraan Lama Hidup: Rata-rata Penduduk dengan Asumsi tidak ada Perubahan pola mortalitas menurut Umur	Laporan BPS	Kepala Dinas Kesehatan

3. Program dan Kegiatan

Guna pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD, Renstra OPD, SPM Bidang Kesehatan ataupun RKT telah ditetapkan 18 (delapan belas) Program, dan 116 Kegiatan, adapun rincian program adalah sebagaimana berikut :

a. Program

Program Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Tahun 2017 yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 5) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
- 6) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- 7) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 8) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- 9) Program Pengembangan Lingkungan Sehat
- 10) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- 11) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- 12) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

- 13) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
- 14) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
- 15) Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
- 16) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
- 17) Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas
- 18) Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Akper

b. Kegiatan

- 1) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan,
- 2) Peningkatan, Pemerataan Obat Dan Perbekalan Kesehatan,
- 3) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas,
- 4) Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS,
- 5) Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien di Puskesmas,
- 6) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan,
- 7) Pelatihan Petugas Kesehatan Jiwa terhadap Penanganan Kegawatdaruratan Psikiatrie (Bebas Pasung),
- 8) Pelayanan Rawat Jalan Gratis di Puskesmas
- 9) Peningkatan Mutu Perizinan Sarana Kesehatan Swasta dan Praktek Perorangan.
- 10) Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (JKN)
- 11) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut.
- 12) Pelayanan Rawat Inap Gratis Ruang Kelas III di Puskesmas.
- 13) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas
- 14) Pembinaan Paguyuban Tuberkulosis Paru
- 15) Pemeriksaan Kebugaran Jasmani Bagi Calon Jamaah Haji,
- 16) Kunjungan Puskesmas Keliling di Desa Terpencil /Desa Perbatasan,

- 17) Fasilitas Kegiatan Penanggulangan dan Pencegahan AIDS,
- 18) Pengembangan Taman Posyandu,
- 19) Biaya Operasional Kesehatan Di Puskesmas,
- 20) Biaya Operasional Kesehatan Di Kabupaten,
- 21) Biaya Jaminan Persalinan,
- 22) Penatalaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN),
- 23) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Dana Pajak Rokok),
- 24) Pelatihan Petugas Kesehatan Jiwa terhadap Penanganan Kegawatdaruratan Psikiatrie (Dana Pajak Rokok),
- 25) Pembinaan Hatra yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Nasional (Dana Pajak Rokok),
- 26) Asuhan Mandiri di Puskesmas dan Masyarakat (Dana Pajak Rokok),
- 27) Standar Perijinan, Sarana, Mutu Pelayanan Kesehatan/ Rumah Sakit (Dana Pajak Rokok),
- 28) Peningkatan Kesehatan Bagi Masyarakat Terdampak/ Pengungsi Korban Bencana (Dana Pajak Rokok)
- 29) Pengembangan Desa Siaga Aktif,
- 30) Pemberdayaan Masyarakat Melalui Posyandu,
- 31) Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Kesehatan Sekolah,
- 32) Pengembangan Media Promosi Kesehatan,
- 33) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Pos Pelayanan Terpadu,
- 34) Peningkatan Kapasitas Kader Saka Bhakti Husada,
- 35) Survey Rumah Tangga Ber-PHBS,
- 36) Peningkatan Kapasitas Petugas Puskesmas,
- 37) Peningkatan Kinerja Poskestren,
- 38) Sosialisasi Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas untuk Remaja Pedesaan,

- 39) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Pos Pelayanan Terpadu (Dana Pajak Rokok),
- 40) Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin,
- 41) Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, GAKY, Kurang Vit. A dan kekurangan zat Gizi Mikro Lainnya,
- 42) Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi),
- 43) Sosialisasi, Pembinaan dan Penyuluhan Bidang Kesehatan/ Kelas Gizi,
- 44) Pembinaan dan Pengawasan Air Bersih dan Depo Air Minum,
- 45) Pengolahan Limbah Medis Padat,
- 46) Fasilitasi Penyelenggaraan Open Defecation Free (ODF),
- 47) Pengembangan Program Kabupaten Sehat,
- 48) Pembangunan Pengolahan Limbah,
- 49) Fasilitasi Penyelenggaraan Open Defecation Free (ODF) (Dana Pajak Rokok),
- 50) Penyemprotan Fogging/Sarang Nyamuk,.
- 51) Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular,
- 52) Peningkatan Cakupan Imunisasi,.
- 53) Pengadaan Sarana Penyimpan Vaksin,.
- 54) Pekan Imunisasi Nasional/Campak, .
- 55) Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah
- 56) Penanggulangan Penderita AFP, Kasus Campak, KLB Flu Burung,
- 57) Penanggulangan Penyakit Tidak Menular,.
- 58) Pengamatan dan Pencegahan Program Imunisasi dan Penanggulangan Kasus Difteri,.
- 59) Pemeriksaan Papsmear, IVA dan Kanker Payudara,

- 60) Pembuatan Profil Kesehatan,
- 61) Peningkatan Petugas tentang Simpustronik,
- 62) Aplikasi Data SIK secara Elektronik,
- 63) Penilaian Kinerja Puskesmas,
- 64) Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK Non Fisik),
- 65) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Puskesmas Menuju BLUD,
- 66) Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas,
- 67) Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya,
- 68) Pengadaan Puskesmas Keliling,
- 69) Pembangunan Poskesdes,.
- 70) Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu
- 71) Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (Dbh Ct),
- 72) Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas (DAK),
- 73) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu dan Anak,
- 74) Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas,
- 75) Pengembangan Sarana Prasarana Puskesmas,
- 76) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Dokter,
- 77) Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (BK),
- 78) Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita
- 79) Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga,
- 80) Peningkatan Kualitas Laboratorium Pemeriksaan Makanan dan Minuman,
- 81) Pembinaan Puskesmas PONED oleh Tim PONEK Kabupaten
- 82) Telaah Manajemen Program Kesehatan Reproduksi,
- 83) Telaahan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA),.
- 84) Peningkatan Kesehatan Usia Lanjut (Usila)

- 85) Audit Maternal Perinatal (AMP) .
- 86) Puskesmas Peduli Lansia.
- 87) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas,
- 88) Penyelenggaraan Operasional Akper,

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan, maka langkah-langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang dapat diukur secara kuantitatif dan/atau kualitatif melalui suatu rumusan indikator kinerja berdasarkan kelompok sasaran yang disertai dengan kebutuhan pendanaan/pagu indikatif secara bertahap selama lima tahun. Program berperan sebagai arah untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang pada akhirnya mempunyai kontribusi dalam pencapaian visi dan misi organisasi.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
7. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
8. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
9. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
10. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular
11. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
12. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
13. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
14. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

15. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
16. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
17. Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas
18. Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Akper

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, telah dilakukan perjanjian pelaksanaan kegiatan antara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dengan Bupati selaku atasan langsung sebagai upaya optimalisasi pencapaian target kinerja jangka menengah dengan sasaran strategis dan indikator kinerja serta target, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan Indikator Kinerja:
 - Angka Harapan Hidup dengan target 71.79

Penetapan kinerja Tahun 2017 untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan yang telah disepakati bersama dengan Bupati Lamongan selaku atasan langsung selengkapnya sebagaimana terlampir.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2017

Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai. Selanjutnya, akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Hasil dari kinerja program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan kesehatan pada tahun anggaran 2017 dijelaskan berdasarkan pencapaian dalam pengukuran kinerja, dimana hasil pengukuran kinerja tersebut dikategorikan berdasarkan skala sebagai berikut:

90 – 100 : Sangat Berhasil

70 – 90 : Berhasil

55 – 70 : Kurang Berhasil

< 55 : Belum Berhasil

Hasil pengukuran, evaluasi, dan realisasi sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2017 (%)	CAPAIAN TAHUN 2017 (%)	KETERANGAN
1	Angka Harapan Hidup	71.79	71.79	Sangat Berhasil

Data dari Indikator Angka Harapan Hidup tahun 2017 di Kabupaten Lamongan adalah 71.79, hal ini sama dengan target

yang ditentukan 71.79, maka capaian dari indikator tersebut adalah 100% atau dapat dikatakan sangat berhasil. Angka Harapan Hidup dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah angka kematian ibu, angka kematian bati, persentase balita gizi buruk mendapat perawatan, capaian layanan pengobatan ARV (Casecade HIV/AIDS), prevalensi kusta, angka bebas pasung, CNR kasus TB, Succes Rate TB BTA (+), persentase desa ODF serta persentase puskesmas terakreditasi.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya

Untuk mengetahui keberhasilan kinerja saat ini, dibutuhkan satu perbandingan dengan target maupun capaian di tahun sebelumnya. Adapun target maupun capaian tahun sebelumnya dengan tahun ini bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Indikator	Tahun 2016		Tahun 2017	
		Target	Capaian	Target	Capaian
1	Angka Harapan Hidup	71.77	71.77	71.79	71.79

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Dari masing-masing indikator kinerja bidang kesehatan, ditentukan target nasional sebagai acuan untuk menentukan target capaian di kabupaten. Untuk perbandingan target maupun capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan terhadap target Nasional bisa dilihat pada table di bawah ini:

No	Indikator	Target s/d (2017)	Capaian (2017)
1	Angka Harapan Hidup	71.79	71.79

B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Pada Indikator Angka Harapan Hidup tahun 2017 di Kabupaten Lamongan adalah 71.79, hal ini sama dengan target yang ditentukan 71.79, maka capaian dari indikator tersebut adalah 100% atau dapat dikatakan sangat berhasil. Angka Harapan Hidup tersebut disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah angka kematian ibu, angka kematian bati, persentase balita gizi buruk mendapat perawatan, capaian layanan pengobatan ARV (Casecade HIV/AIDS), prevalensi kusta, angka bebas pasung, CNR kasus TB, Succes Rate TB BTA (+), persentase desa ODF serta persentase puskesmas terakreditasi.

2. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (dana, sarana prasarana dan SDM)

Sumber daya aparatur di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan hingga saat ini berjumlah 2.125 orang. Masih terdapat kekurangan tenaga kesehatan dan tenaga umum untuk lebih dapat mengoptimalkan kinerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.

Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar dapat mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra-OPD maupun Standart Pelayanan Minimal sesuai Permenkes Nomor 43 Tahun 2016.

3. Analisis program dan kegiatan penunjang keberhasilan ataupun kegagalan

Program dan kegiatan penunjang keberhasilan capaian target kinerja tidak terlepas dari sistem perencanaan yang membreakdown dari target kinerja sasaran yang ingin dicapai khususnya yang langsung bersentuhan dengan kepentingan pelayanan masyarakat/ stake holders.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2017

Untuk mencapai indikator keberhasilan selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Akuntabilitas keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan tahun 2017 telah dilaporkan melalui Laporan Keuangan, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan dimana pada tahun 2017 anggaran belanja yang diperoleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan sebesar **Rp. 244.585.791.911,20** yang terdiri atas :

URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Tidak Langsung	Rp. 72.512.964.642,20	Rp. 71.157.090.443,00	98,13%
Belanja Langsung	Rp. 172.072.827.269,00	Rp. 158.275.960.014,00	91,98%
TOTAL BELANJA	Rp. 244.585.791.911,20	Rp. 229.433.050.457,00	93,80%

Program dan Kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Kesehatan dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan kesehatan pada tahun 2017 dengan alokasi dana sebesar Rp.172.072.827.269,- dengan realisasi sebesar Rp.158.275.960.014,- Atau dalam prosentase sebesar 91.98%. Adapun penjelasan tentang penggunaan anggaran masing-masing program adalah sebagai berikut :

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
 - a. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 6.000.000.000,- digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bahan/material, belanja cetak, belanja makanan dan minuman, belanja perjalanan dinas, belanja bahan obat-obatan, dengan volume

kegiatan 1 paket serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 5.997.440.975,- atau 99.69%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan paket pesanan obat E katalog di tolak dan penyedia tidak mengirim barang.

- b. Peningkatan, Pemerataan Obat Dan Perbekalan Kesehatan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 25.000.000,- digunakan untuk belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka pendistribusian obat ke Puskesmas, dengan volume kegiatan 124 orang di 31 Puskesmas serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 25.000.000,- atau 100%.
- c. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas, dengan alokasi dana sebesar Rp. 25.000.000,- digunakan untuk belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka monitoring dan evaluasi obat ke Puskesmas, dengan volume kegiatan 124 orang di 31 Puskesmas serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 25.000.000,- atau 100%.

2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

- a. Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS, dengan alokasi dana sebesar Rp. 100.000.000,- dipergunakan untuk belanja bahan/material/*Rapid Test (1.642 buah)*, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 97.000.950,- atau 97.00%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan terdapat selisih nilai harga kontrak dengan harga riil.
- b. Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien di Puskesmas, dengan alokasi dana sebesar Rp. 506.000.000,- dipergunakan untuk belanja makanan dan minuman harian pasien rawat inap, dengan volume kegiatan 32 Puskesmas perawatan. Adapun

- realisasi keuangan sebesar Rp. 505.999.000,- atau 99.99%. Realisasi tidak mencapai 100% dikarenakan penyediaan makanan dan minuman pasien di Puskesmas disesuaikan dengan kunjungan pasien rawat inap umum.
- c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 15.000.000,- dipergunakan untuk pertemuan pemegang program Laboratorium Puskesmas dan pemegang program Public Health Nurse (PHN), dengan volume kegiatan 66 orang serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 14.450.000,- atau 96.33%.
 - d. Pelatihan Petugas Kesehatan Jiwa terhadap Penanganan Kegawatdaruratan Psikiatrie (Bebas Pasung), dengan alokasi dana sebesar Rp. 60.000.000,- dipergunakan untuk perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pembinaan petugas kesehatan jiwa menuju masyarakat bebas pasung dengan volume kegiatan 66 orang serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 60.000.000,- atau 100%.
 - e. Pelayanan Rawat Jalan Gratis di Puskesmas dengan alokasi dana sebesar Rp. 550.000.000,- digunakan antara lain untuk pelayanan pasien rawat jalan di Puskesmas yang meliputi belanja bahan pakai habis alat kesehatan/kedokteran, belanja obat-obatan dan belanja jasa pelayanan kesehatan dengan volume kegiatan 33 Puskesmas. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 549.000.000,- atau 99.82%.
 - f. Peningkatan Mutu Perizanan Sarana Kesehatan Swasta dan Praktek Perorangan dengan alokasi dana sebesar Rp. 20.000.000,- dipergunakan untuk monitoring dan pemantauan pelayanan sarana kesehatan swasta terhadap masyarakat dengan volume kegiatan 62 orang serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 20.000.000,- atau 100%.

- g. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (JKN) dengan alokasi dana sebesar Rp. 72.075.177.787,- dipergunakan untuk belanja barang dan jasa operasional Jaminan Kesehatan Nasional dengan volume kegiatan 1 paket serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 62.293.970.466,- atau 86.43%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan jumlah klaim dari Puskesmas dan sisa dana JKN (Kapitasi dan Non Kapitasi/Klaim) bersifat *multi years* yang bisa digunakan untuk tahun berikutnya dengan kegiatan yang sama.
- h. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut dengan alokasi dana sebesar Rp. 77.000.000,- dipergunakan antara lain untuk biaya kegiatan UKGS terutama untuk belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih dengan volume kegiatan 625 buah serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 77.000.000,- atau 100%.
- i. Pelayanan Rawat Inap Gratis Ruang Kelas III di Puskesmas dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.750.000.000,- digunakan antara lain untuk pelayanan rawat inap pasien kelas III yang meliputi belanja bahan habis pakai, obat-obatan, jasa pelayanan kesehatan, makanan dan minuman pasien serta untuk biaya jasa pelayanan masyarakat dengan volume kegiatan 32 Puskesmas Rawat Inap. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1.748.900.000,- atau 99.94%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan jasa pelayanan untuk pelayanan rawat inap di Puskesmas menyesuaikan jumlah kunjungan pasien rawat inap.
- j. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,- dipergunakan untuk belanja makanan dan minuman rapat pemegang program JKN Puskesmas, Kepala Puskesmas dalam rangka JKN, dan bendahara JKN

- Puskesmas dengan volume kegiatan 40 orang serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 49.100.000 atau 98.20%.
- k. Pembinaan Paguyuban Tuberkulosis Paru dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,- dipergunakan antara lain untuk belanja bahan makanan Susu suplemen untuk meningkatkan gizi penderita TB dengan volume kegiatan 2.076 sach. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 45.859.400,- atau 91.72%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan hal tersebut terdapat selisih harga kontrak dengan harga riil.
 - l. Pemeriksaan Kebugaran Jasmani Bagi Calon Jamaah Haji, dengan alokasi dana sebesar Rp. 30.000.000,- dipergunakan antara lain untuk belanja jasa narasumber, belanja makanan dan minuman petugas kesehatan olah raga, konsumsi peserta pemeriksaan kebugaran dengan volume kegiatan 400 box serta kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 22.850.000,- atau 76.17%.
 - m. Kunjungan Puskesmas Keliling di Desa Terpencil /Desa Perbatasan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 300.000.000,- dipergunakan antara lain untuk belanja bahan pakai habis laboratorium, belanja bahan obat-obatan, belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum, belanja perjalanan dinas dalam daerah dengan volume kegiatan 32 orang serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 299.690.715,- atau 99.90%.
 - n. Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan dan Pencegahan AIDS, dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,- dipergunakan antara lain untuk cetak leaflet (7.900 lembar) dan poster (4.061 lembar), kursus-kursus singkat/pelatihan, belanja makan dan minuman rapat dengan volume 74 box serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 49.216.360,- atau 98.43%.

- o. Pengembangan Taman Posyandu dengan alokasi dana sebesar Rp. 125.000.000,- dipergunakan untuk rapat koordinasi lintas sektor dan lintas program Kabupaten pendampingan taman posyandu, Rapat evaluasi taman posyandu, refreshing kader, magang kader, workshop penguatan advokasi pendampingan taman posyandu dan sosialisasi pengembangan pendampingan taman posyandu. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 125.000.000,- atau 100%.
- p. Biaya Operasional Kesehatan Di Puskesmas, dengan alokasi dana sebesar Rp. 13.200.000.000,- dipergunakan untuk belanja bahan pakai habis laboratorium, belanja bahan makanan, belanja makanan dan minuman rapat, dengan volume kegiatan 1 paket. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 13.086.656.500,- atau 99.14%. Realisasi tidak dapat terserap 100% dikarenakan.
- q. Biaya Operasional Kesehatan Di Kabupaten, dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.167.096.000,- dipergunakan untuk belanja bahan pakai habis laboratorium, belanja bahan makanan, belanja makanan dan minuman rapat, dengan volume kegiatan 1 paket. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 898.355.750,- atau 76.97%.
- r. Biaya Jaminan Persalinan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.268.347.000,- dipergunakan untuk belanja bahan pakai habis, belanja bahan bakar minyak/gas, belanja perjadi dalam daerah, dengan volume kegiatan 1 paket. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 442.017.000,- atau 34.85%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan penyerapan anggaran disesuaikan dengan rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan.
- s. Penatalaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) dengan alokasi Rp. 100.000.000,- dipergunakan untuk belanja bahan pakai habis, belanja sewa perlengkapan dan

peralatan kantor, belanja makanan dan minuman rapat dengan volume kegiatan 700 box serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 99.999.900,- atau 99.99%.

- t. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Dana Pajak Rokok) dengan alokasi Rp. 30.000.000,- dipergunakan untuk belanja kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 29.900.000,- atau 99.67%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan harga cetak banner di SAB terlalu tinggi dibandingkan di pasaran.
- u. Pelatihan Petugas Kesehatan Jiwa terhadap Penanganan Kegawatdaruratan Psikiatrie (Dana Pajak Rokok), dengan alokasi dana sebesar Rp. 587.500.280,- dipergunakan untuk pelatihan kader kesehatan jiwa, jambore kesehatan jiwa kabupaten lamongan dan kendaraan bermotor roda dua untuk petugas kesehatan jiwa serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 499.100.000,- atau 84.95%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan kelebihan anggaran pada DPA untuk harga kendaraan bermotor roda dua.
- v. Pembinaan Hatra yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Nasional (Dana Pajak Rokok), dengan alokasi dana sebesar Rp. 30.000.000,- dipergunakan untuk belanja kegiatan pembinaan hatra serta kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 30.000.000,- atau 100%.
- w. Asuhan Mandiri di Puskesmas dan Masyarakat (Dana Pajak Rokok) dengan alokasi dana sebesar Rp. 30.000.000,- dipergunakan untuk belanja kegiatan asuhan mandiri di puskesmas dan masyarakat serta kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 30.000.000,- atau 100%.

- x. Standar Perijinan, Sarana, Mutu Pelayanan Kesehatan/ Rumah Sakit (Dana Pajak Rokok), dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,- dipergunakan untuk belanja kegiatan standart perijinan, sarana, mutu pelayanan kesehatan/ rumah sakit serta kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 49.500.000,- atau 99.00%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan harga cetak banner di SAB terlalu tinggi dibandingkan di pasaran.
 - y. Peningkatan Kesehatan Bagi Masyarakat Terdampak/ Pengungsi Korban Bencana (Dana Pajak Rokok), dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,- dipergunakan untuk belanja kegiatan peningkatan kesehatan bagi maysarakat terdampak/ pengungsi korban bencana serta kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 49.700.000,- atau 99.40%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan harga cetak banner di SAB terlalu tinggi dibandingkan di pasaran.
3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- a. Pengembangan Desa Siaga Aktif, dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,- dipergunakan antara lain untuk sosialisasi kegiatan dalam rangka pengembangan desa siaga aktif, dengan volume kegiatan 66 orang. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 50.000.000,- atau 100%.
 - b. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Posyandu, dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,- dipergunakan antara lain untuk belanja jasa narasumber untuk peningkatan kapasitas kader posyandu, belanja transpotasi dan akomodasi dengan volume kegiatan 200 OK serta kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar 50.000.000,- atau 100%.
 - c. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Kesehatan Sekolah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 30.000.000,- dipergunakan

- antara lain untuk penggandaan buku Kesehatan Anak dan Remaja Awal (KARA), penggandaan buku Kesehatan Remaja (Karem), sosialisasi petugas Puskesmas ke Sekolah dalam rangka Peningkatan Kapasitas Kader Tiwisada (Dokter Kecil), sosialisasi petugas Puskesmas ke Kabupaten, bimbingan teknis petugas Kabupaten ke Puskesmas dengan volume kegiatan 33 orang, serta kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar 30.000.000,- atau 100%.
- d. Pengembangan Media Promosi Kesehatan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 75.000.000,- dipergunakan antara lain untuk pengadaan peralatan promosi/baliho dengan volume kegiatan 2 buah dan spanduk dengan volume kegiatan 24 buah, serta kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 75.000.000,- atau 100%.
 - e. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Pos Pelayanan Terpadu, dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.740.000.000,- dipergunakan antara lain untuk belanja hibah barang atau jasa berupa angkutan darat tidak bermotor (sepeda pancal) untuk kader kesehatan pos pelayanan terpadu (posyandu), uang insentif kader kesehatan posyandu dengan volume kegiatan 1.740 buah, serta kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1.740.000.000,- atau 100%.
 - f. Peningkatan Kapasitas Kader Saka Bhakti Husada, dengan alokasi dana sebesar Rp. 25.000.000,- dipergunakan antara lain untuk sosialisasi dalam rangka kegiatan peningkatan kapasitas kader Saka Bakti Husada, perjalanan dinas petugas Kabupaten pembinaan dalam rangka bimtek peningkatan kapasitas kader Saka Bakti Husada, perjalanan dinas petugas Puskesmas pembinaan ke Sekolah dengan volume kegiatan 33 orang, serta kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar 25.000.000,- atau 100%.

- g. Survey Rumah Tangga Ber-PHBS, dengan alokasi dana sebesar Rp. 25.000.000,- dipergunakan antara lain untuk pembinaan rumah tangga sehat, sosialisasi kegiatan dalam rangka pertemuan PHBS dengan volume kegiatan 33 orang, serta kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar 25.000.000,- atau 100%.
- h. Peningkatan Kapasitas Petugas Puskesmas, dengan alokasi dana sebesar Rp. 30.000.000,- dipergunakan antara lain untuk sosialisasi peningkatan kapasitas petugas Promkes dan UKS dengan volume kegiatan 66 orang, serta kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar 30.000.000,- atau 100%.
- i. Peningkatan Kinerja Poskestren, dengan alokasi dana sebesar Rp. 20.000.000,- dipergunakan antara lain untuk belanja jasa narasumber/tenaga ahli peningkatan kapasitas kader santri husada di pondok pesantren, belanja sosialisasi untuk petugas kabupaten dengan volume kegiatan 21 OK, serta kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar 20.000.000,- atau 100%.
- j. Sosialisasi Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas untuk Remaja Pedesaan, dengan alokasi dan sebesar Rp. 45.000.000,- dipergunakan antara lain untuk belanja jasa narasumber/tenaga ahli dalam rangka sosialisasi kesehatan reproduksi remaja, transportasi dan akomodasi dalam rangka sosialisasi kesehatan reproduksi remaja dengan volume kegiatan 200 orang, serta kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar 45.000.000,- atau 100%.
- k. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Pos Pelayanan Terpadu (Dana Pajak Rokok), dengan alokasi dana sebesar Rp. 150.000.000,- dipergunakan antara lain untuk belanja kegiatan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di posyandu serta kegiatan penunjang lainnya.

Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 149.300.000,- atau 99.53%.

4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

- a. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin, dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.500.000.000,- antara lain untuk belanja bahan makanan untuk balita, bumil, serta makanan tambahan pemulihan bagi balita gizi buruk dan ibu hamil KEK. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1.479.097.210,- atau 98.61%. realisasi tidak terserap 100% dikarenakan adanya selisih harga saat pengadaan bahan makanan tambahan.
- b. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, GAKY, Kurang Vit. A dan kekurangan zat Gizi Mikro Lainnya, dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,- dipergunakan untuk pertemuan dalam rangka Pembentukan motivator ASI, Penanggulangan Anemia Gizi Besi, penanggulangan KEP, dengan volume kegiatan 33 orang. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 50.000.000,- atau 100%.
- c. Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi), dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,- dipergunakan antara lain untuk pembentukan desa Kadarzi serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 49.999.950,- atau 99.99%.
- d. Sosialisasi, Pembinaan dan Penyuluhan Bidang Kesehatan/ Kelas Gizi, dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,- dipergunakan untuk belanja jasa narasumber/ tenaga ahli/ instruktur dengan volume kegiatan 50 OJ dan belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis dengan volume kegiatan 100 OK serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 50.000.000,- atau 100%.

5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

- a. Pembinaan dan Pengawasan Air Bersih dan Air Minum, dengan alokasi dana Rp. 20.000.000,- dipergunakan antara lain untuk pengujian laboratorium pemeriksaan bakteriologis air depo, pembinaan dan pengawasan depo, dengan volume kegiatan 10 sampel serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapaun realisasi keuangan sebesar 20.000.000,- atau 100%.
- b. Pengolahan Limbah Medis Padat, dengan alokasi dana sebesar Rp. 300.000.000,- dipergunakan biaya pengambilan dan pemusnahan limbah B3, dengan volume kegiatan 14.472 Kg. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 300.000.000,- atau 100%.
- c. Fasilitasi Open Defecation Free (ODF), dengan alokasi dana sebesar Rp. 100.000.000,- dipergunakan antara lain untuk perjalanan dinas dalam rangka pemicuan masyarakat desa, monitoring dan evaluasi (bimtek pasca pemicuan) dan verifikasi ODF, dengan volume kegiatan 43 desa serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 94.541.000,- atau 94.54%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan di DPA ODF perjalanan dinas dalam daerah menggunakan gol. II Rp. 100.000,-.
- d. Pengembangan Program Kabupaten Sehat, dengan alokasi dana sebesar Rp. 225.000.000,- dipergunakan untuk belanja bahan pakai habis, belanja cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman, belanja perjalanan dinas, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis dengan volume kegiatan tingkat kabupaten 20 orang dan tingkat kecamatan 27 orang serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 163.910.900,- atau 72.85%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan kegiatan pembinaan di tingkat kecamatan tidak dilaksanakan.

- e. Pembangunan Pengolahan Limbah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.800.000.000,- dipergunakan untuk pengadaan kontruksi sarana kesehatan (pembangunan IPAL), dengan volume kegiatan 15 paket. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 2.768.587.000,- atau 98.88%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan nilai pagu tidak sama dengan nilai kontrak, nilai pagu lebih besar dari pada nilai kontrak.
 - f. Fasilitas Open Defecation Free (ODF) (dana Pajak Rokok), dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,- dipergunakan antara lain untuk perjalanan dinas dalam rangka pemicuan masyarakat desa, monitoring dan evaluasi (bimtek pasca pemicuan) dan verifikasi ODF, dengan volume kegiatan 43 desa serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 50.000.000,- atau 100%.
6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- a. Penyemprotan Fogging/Sarang Nyamuk, dengan alokasi dana sebesar Rp. 460.000.000,- dipergunakan untuk belanja bahan pakai habis alat kesehatan/kedokteran (Melathion), pengadaan bahan pembunuh jentik nyamuk DBD, belanja bahan pencampur (solar, bensin) serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 441.976.000,- atau 96.08%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan adanya perbedaan harga nilai DPA dengan harga riil khususnya untuk harga bahan bakar minyak dan gas.
 - b. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, dengan alokasi dana sebesar Rp. 100.000.000,- dipergunakan untuk pengadaan minyak emersi, cetak blanko TB, pembelian pot sputum untuk program P2TB, biaya pelacakan dan pencarian penderita kusta dengan volume kegiatan 15.112 buah, serta untuk kegiatan penunjang lainnya.

Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 100.000.000,- atau 100%.

- c. Peningkatan Cakupan Imunisasi, dengan alokasi dana sebesar Rp. 15.000.000,- dipergunakan untuk biaya perjalanan dinas pengambilan vaksin petugas Kabupaten ke Provinsi, pertemuan validasi data laporan imunisasi dengan volume kegiatan 99 orang, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 14.999.950,- atau 99.99%.
- d. Pengadaan Sarana Penyimpan Vaksin, dengan alokasi dana sebesar Rp. 100.000.000,- dipergunakan untuk pembelian lemari es penyimpanan vaksin, dengan volume kegiatan 2 unit. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 98.414.600,- atau 98.41%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan adanya perbedaan antara harga perkiraan pasar (HPS) dengan harga yang sesungguhnya.
- e. Pekan Imunisasi Nasional/Campak, dengan alokasi dana sebesar Rp. 150.000.000,- dipergunakan untuk sosialisasi pertemuan persiapan dan evaluasi pelaksanaan PIN/campak, perjalanan dinas petugas Kabupaten ke Puskesmas dalam rangka pelaksanaan PIN/Campak, dengan volume kegiatan 66 orang serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 148.770.000,- atau 99.18%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan adanya perbedaan antara harga perkiraan pasar (HPS) dengan harga yang sesungguhnya.
- f. Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 20.000.000,- dipergunakan untuk sosialisasi persiapan dan evaluasi pelaksanaan BIAS, perjalanan dinas petugas Kabupaten ke Puskesmas dalam rangka monitoring pelaksanaan BIAS, dengan volume kegiatan 8 OK perjalanan dinas luar daerah dan volume kegiatan 50 OK

perjalanan dinas dalam daerah serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 19.700.000,- atau 98.50%.

- g. Penanggulangan Penderita AFP, Kasus Campak, KLB Flu Burung, dengan alokasi dana sebesar Rp. 20.000.000,- dipergunakan untuk transportasi petugas Kabupaten ke Puskesmas dalam rangka pelacakan AFP, Campak, KLB, Flu Burung, pelacakan kasus ke Puskesmas, pengiriman spesimen ke BBLK, dengan volume kegiatan 10 OK perjalanan dinas luar daerah dan volume kegiatan 44 OK perjalanan dinas dalam daerah serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 20.000.000,- atau 100%.
- h. Penanggulangan Penyakit Tidak Menular, dengan alokasi dana sebesar Rp. 150.000.000,- dipergunakan untuk belanja bahan habis pakai laboratorium (PTM, Pemeriksaan Haji), pembinaan Program Penyakit Tidak Menular petugas Kabupaten ke Puskesmas dengan volume 99 orang. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 145.173.200,- atau 96.78%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan adanya perbedaan antara harga perkiraan pasar (HPS) dengan harga yang sesungguhnya.
- i. Pengamatan dan Pencegahan Program Imunisasi dan Penanggulangan Kasus Difteri, dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000,- dipergunakan untuk pertemuan dalam rangka review program P2 Difteri, perjalanan dinas untuk pelacakan kasus Difteri oleh petugas Kabupaten ke Puskesmas, pengiriman spesimen ke BBLK dengan volume 66 orang. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 10.000.000,- atau 100%.
- j. Pemeriksaan Papsmear, IVA dan Kanker Payudara, dengan alokasi dana sebesar Rp. 200.000.000,- dipergunakan untuk pemeriksaan sediaan papsmear, jasa petugas pengambilan

sample papsmear dan pemeriksaan payudara, dengan volume kegiatan 900 orang, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 199.999.900,- atau 99,99%.

7. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

- a. Pembuatan Profil Kesehatan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 45.000.000,- dipergunakan untuk belanja cetak dan penggunaan dokumen profil untuk Puskesmas, sosialisasi data profil bagi pengelola profil Dinkes dan Puskesmas, transportasi dan akomodasi bagi pengelola data profil Puskesmas, dengan volume kegiatan 33 Puskesmas. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 44.997.000,- atau 99.99%.
- b. Peningkatan Petugas tentang Simpustronik, dengan alokasi dana sebesar Rp. 40.000.000,- dipergunakan untuk sosialisasi kajian pengembangan SIMPUSTRONIK, bimbingan teknis ke Puskesmas, dengan volume kegiatan 99 OK. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 39.349.850,- atau 98.37%.
- c. Aplikasi Data SIK secara Elektronik, dengan alokasi dana sebesar Rp. 210.000.000,- dipergunakan untuk belanja modal pengadaan komputer/pc dengan volume kegiatan 6 paket, belanja modal pengadaan piranti lunak dengan volume kegiatan 3 paket serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 205.980.000,- atau 98.09%.
- d. Penilaian Kinerja Puskesmas, dengan alokasi dana sebesar Rp. 30.000.000,- dipergunakan untuk perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Penilaian Kinerja Puskesmas tahun 2017 serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 29.400.000,- atau 98.00%.
- e. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK Non Fisik), dengan alokasi dana sebesar Rp.

1.804.267.000,- dipergunakan untuk rapat penilaian akreditasi, perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pendampingan dan penilaian akreditasi Puskesmas, dengan volume kegiatan 16 Puskesmas, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1.612.459.226,- atau 89.37%.

- f. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Menuju BLUD, dengan alokasi dana sebesar Rp. 500.000.000,- dipergunakan untuk belanja sertifikasi dengan volume kegiatan 1 paket serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 500.000.000,- atau 100%.
- g. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dengan alokasi dana sebesar 300.000.000,- dipergunakan untuk belanja kegiatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar di puskesmas serta kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 200.943.563,- atau 66.98%.

8. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

- a. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya, dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.089.052.000,- dipergunakan untuk belanja premi asuransi kesehatan dengan volume kegiatan 1 paket, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 3.788.100.940,- atau 92.63%.

9. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

- a. Pengadaan Puskesmas Keliling, dengan alokasi dana sebesar Rp. 630.000.000,- dipergunakan untuk pengadaan kendaraan pusling ambulance/mobil jenazah dengan volume 2 unit, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 628.469.900,- atau 99.76%. Realisasi tidak

terserap 100% karena sisa kontrak pengadaan pusling sebesar Rp. 780.000,- dan perjadiin pengambilan pusling Rp. 750.000,-

- b. Pembangunan Ponkesdes, dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.955.476.000,- dipergunakan untuk pengadaan kontruksi sarana kesehatan Ponkesdes dengan volume kegiatan 20 paket, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 2.948.854.740,- atau 99.78%.
- c. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu, dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.954.870.000,- dipergunakan untuk Rehab Puskesmas Pembantu dengan volume kegiatan 10 paket, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1.951.271.310,- atau 99.82%.
- d. Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas, dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- dipergunakan untuk belanja pengadaan alat-alat kesehatan puskesmas. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1.901.827.420,- atau 95.09%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan sisa kontrak belanja modal pengadaan alat kesehatan puskesmas.
- e. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas, dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.397.000.000,- dipergunakan untuk Rehabilitasi Puskesmas dengan volume kegiatan 1 paket, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1.366.768.500,- atau 97.84%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan ada sisa kontrak.
- f. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu dan Anak, dengan alokasi dana sebesar Rp. 11.250.000.000,- dipergunakan untuk pembelian mobil sehat dengan volume kegiatan 50 unit, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 11.206.700.000,- atau 99.62%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan sisa

kontrak belanja modal pengadaan alat angkutan darat bermotor bantu kerja dan perjadiin pengambilan mobil sehat.

- g. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas, dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.662.654.000,- dipergunakan untuk Rehabilitasi Puskesmas dengan volume kegiatan 4 paket, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 3.542.357.250,- atau 96.72%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan ada sisa kontrak.
 - h. Pengembangan Sarana Prasarana Puskesmas, dengan alokasi dana sebesar Rp. 180.000.000,- dipergunakan untuk pengadaan kontruksi sarana Puskesmas dengan volume kegiatan 2 paket, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 179.306.950,- atau 99.61%.
 - i. Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas Dokter, dengan alokasi dana sebesar Rp. 410.000.000,- digunakan untuk rehabilitasi rumah dinas dokter dengan volume 2 paket serta kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 404.107.950,- atau 98.56%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan terdapat sisa kontrak.
 - j. Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (BK), dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- dipergunakan untuk belanja modal alat-alat kesehatan serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 4.833.134.320,- atau 96.66%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan sisa kontrak pengadaan.
10. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
- a. Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita, dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,- dipergunakan untuk, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 49.999.900,- atau 99.99%.

11. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
 - a. Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga, dengan alokasi dana sebesar Rp. 20.000.000,- dipergunakan untuk pertemuan pengelola industri rumah tangga pangan, perjalanan dinas dalam rangka pengawasan sarana produksi industri rumah tangga, serta untuk kegiatan penunjang lainnya dengan volume kegiatan 40 orang. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 20.000.000,- atau 100%.
 - b. Peningkatan Kualitas Laboratorium Pemeriksaan Makanan dan Minuman, dengan alokasi dana sebesar Rp. 20.000.000,- dipergunakan untuk belanja bahan pakai habis laboratorium dan pemeriksaan sampel udara serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 20.000.000,- atau 100%.

12. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
 - a. Pembinaan Puskesmas PONED oleh Tim PONEK Kabupaten, dengan alokasi dana sebesar Rp. 240.000.000,- dipergunakan untuk Pembinaan Puskesmas PONED, pengadaan buku pedoman pengelolaan Puskesmas PONED, belanja perjalanan dinas/uang saku peserta pembinaan serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 234.074.900,- atau 97.53%.
 - b. Telaah Manajemen Program Kesehatan Reproduksi, dengan alokasi dana sebesar Rp. 100.000.000,- dipergunakan untuk telaah manajemen kesehatan reproduksi, belanja cetak dan penggandaan kohort KB dengan volume kegiatan 594 buku serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 100.000.000,- atau 100%.

- c. Telaahan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), dengan alokasi dana sebesar Rp. 100.000.000,- dipergunakan untuk telaah kesehatan ibu dan anak, belanja cetak dan penggandaan buku KIA, kohort bayi, kohort balita, kohort apras, kohort ibu dan untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 100.000.000,- atau 100%.
 - d. Telaahan Kesehatan Usia Lanjut (Usila) dengan alokasi dana sebesar Rp. 100.000.000,- dipergunakan untuk pembinaan petugas USILA Puskesmas serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 100.000.000,- atau 100%.
 - e. Audit Maternal Perinatal, dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,- dipergunakan untuk pengkajian dan pembelajaran kasus kematian ibu dan bayi (AMP), belanja transport dan akomodasi uang saku peserta pembinaan serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 50.000.000,- atau 100%.
 - f. Puskesmas Peduli Lansia dengan alokasi dana sebesar Rp.250.000.000,- dipergunakan untuk belanja bahan pakai habis alat kesehatan, belanja modal alat pemeriksaan lab. Kolesterol, lab. Gula darah, lab. Asam urat dengan volume kegiatan 99 set, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 248.506.650,- atau 99.40%.
13. Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas
- a. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas, dengan alokasi dana sebesar Rp. 7.097.716.070,- dipergunakan untuk belanja jasa tenaga administrasi, penunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 6.875.452.992,- atau 96.87%.

14. Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Akper

- a. Penyelenggaraan Pelayanan Operasional AKPER, dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.869.769.632,- digunakan untuk kegiatan operasional Akper Lamongan serta kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 2.316.881.359,- atau 80.73%.

Dari hasil evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan ada beberapa program yang pencapaian anggarannya kurang dari 100%. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa sebab, diantaranya perencanaan yang kurang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan, sehingga tidak sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan (SAB), serta penyerapan anggaran yang kurang.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) yang dalam hal ini mengalami perubahan sesuai dengan penyempurnaan Matrik Renstra Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai acuan dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2017 merupakan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mewujudkan keterpaduan dan mensinergiskan pembiayaan kegiatan pembangunan dari berbagai sumber.

Dari kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan bisa tercapai sesuai target yang ditentukan, Indikator Angka Harapan Hidup tahun 2017 di Kabupaten Lamongan adalah 71.79, hal ini sama dengan target yang ditentukan 71.79, maka capaian dari indikator tersebut adalah 100% atau dapat dikatakan sangat berhasil. Angka Harapan Hidup tersebut disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah angka kematian ibu, angka kematian bati, persentase balita gizi buruk mendapat perawatan, capaian layanan pengobatan ARV (Casecade HIV/AIDS), prevalensi kusta, angka bebas pasung, CNR kasus TB, Succes Rate TB BTA (+), persentase desa ODF serta persentase puskesmas terakreditasi.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan mempunyai Rencana Strategi (Renstra- SKPD) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu : mulai tahun 2016 – 2021 dan penyempurnaan Indikator Kinerja Tahun 2017 yang harus dijalankan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan memiliki; 1 (satu) visi dan 1 (satu) misi, 1 (satu)

tujuan, 1 (satu) sasaran, 1 (satu) indikator kinerja, 18 (delapan belas) program yang dilaksanakan melalui 116 (seratus enam belas) kegiatan.

Meskipun dari sumber daya aparatur terdapat kekurangan, akan tetapi dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai target sasaran secara keseluruhan berhasil dengan baik, begitu pula dalam hal efisiensi anggaran juga telah dilaksanakan dengan se efisien mungkin.

Sebagai upaya peningkatan kinerja dimasa yang akan datang diharapkan adanya kecukupan sumber daya aparatur sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada hasil analisa jabatan, adanya kegiatan promosi dan sosialisasi pada program dan kegiatan di masing-masing bidang di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.

B. SARAN

Dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) dapat memberikan motivasi terhadap kinerja organisasi yang lebih baik, sehingga tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dapat berjalan dengan baik.

Untuk kegiatan dengan pencapaian kurang, maka akan lebih meningkatkan koordinasi baik lintas program maupun lintas sektor, sehingga terbentuk satu kerja sama yang baik dengan harapan kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Kesehatan bisa mencapai target yang telah ditetapkan bersama serta diharapkan pula agar pengalokasian anggaran dapat di sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing program maupun kegiatan di masing-masing bidang.

Untuk kegiatan program yang berhubungan dengan anggaran yang tidak seluruhnya terserap, maka diharapkan untuk lebih bisa melaksanakan program dengan perencanaan yang lebih baik guna terpenuhinya hasil yang maksimal seperti yang diharapkan dengan tidak mengabaikan faktor efisiensi dalam penggunaan anggaran.